

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga pemerintahan adalah bagian dari lembaga sektor publik yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Lembaga pemerintahan lebih terkesan sebagai suatu organisasi politik dari pada organisasi ekonomi apabila dibanding dengan organisasi *non-profit* lainnya (Khalikussabir, 2017). Pemerintah pusat menyerahkan hak dan kewajiban kepada pemerintah daerah agar dapat membangun serta mengelola daerah masing-masing dengan baik. Hal tersebut sering dinamakan otonomi daerah.

Otonomi daerah dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014, merupakan kewajiban, hak, serta wewenang daerah otonom untuk mengurus serta mengatur sendiri kepentingan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. Setiap daerah memiliki hak untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan daerah seperti halnya pemilihan pemimpin daerah, retribusi daerah dan pemungutan pajak, pengelolaan kekayaan daerah, serta memperoleh bagi hasil berasal dari pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya lain yang ada di daerah. Disamping itu pemerintah juga berkewajiban untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Undang-Undang No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah memerintahkan pemerintah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas

(LAK), Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih), Laporan Operasional (LO), serta Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Laporan keuangan disusun supaya memberikan informasi yang signifikan tentang situasi keuangan serta semua transaksi yang dilaksanakan oleh lembaga pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Fahmi (2018: 142) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik benar.

Kinerja pemerintah sangat mempengaruhi akan keberhasilan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat (Sakti, 2021). Pemerintah harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sebagai organisasi sektor publik yang tugas dan fungsinya dalam menjalankan birokrasi pemerintah sehingga peranannya tidak dapat digantikan oleh pihak swasta. Saat ini, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dihadapkan oleh berbagai tuntutan baik dari sisi internal maupun sisi eksternal pemerintah. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus baik serta maksimal karena setiap masyarakat ingin mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan memiliki standar yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan kinerja. Oleh karena itu pengukuran kinerja pemerintah sangat dibutuhkan.

Pengukuran kinerja diperlukan sebagai upaya untuk meningkatkan pencapaian keberhasilan pelayanan *public* di masa mendatang. Penilaian akuntabilitas kinerja keuangan suatu organisasi pemerintah dapat menggunakan analisis pencapaian target serta realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintah dapat dinilai

dengan *Value for Money* yang memiliki tiga konsep dalam mengembangkan suatu indikator kinerja yang dapat mengukur tingkat rasio ekonomi, efisiensi dan efektifitas (Mardiasmo, 2018). Ekonomi berarti pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisien berarti pencapaian untuk output yang maksimum dengan *input* tertentu, sedangkan efektivitas berarti tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat ekonomi, efektif, serta efisien, suatu lembaga pemerintah maka wajib untuk mengenali tingkat *input*, *output*, serta *outcome*. *Input* yaitu sumber daya yang akan dipakai untuk implementasi suatu program, aktivitas serta kebijakan. *Output* yaitu hasil yang telah didapatkan dari suatu aktivitas, program, dan kebijakan. Dengan melakukan perbandingan keluaran bisa dianalisis apakah kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana (Mardiasmo, 2018). *Outcome* yaitu akibat yang timbul dari suatu kegiatan tertentu. Dengan maksud lain *Outcome* yaitu hasil yang dicapai suatu kegiatan atau program diperbandingkan dengan hasil yang diharapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ialah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sebagai instrument kebijakan, APBD mendukung dalam upaya efektivitas dan kapabilitas pemerintah daerah. APBD dapat digunakan sebagai alat dalam menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian pembangunan, serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah yang berada di Jl. Kapten A. Rivai No. 51 Palembang.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari lima belas bagian Bidang dan lima belas Sub Bagian yang bertugas yaitu Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berperan sebagai Pengelola Keuangan dan Aset daerah tentu membuat tugas dan fungsi BPKAD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri menjadi sangat strategis. Untuk melakukan fungsinya tersebut para pegawai BPKAD tentunya harus memiliki kinerja keuangan yang baik di setiap bidangnya.

Berikut ini merupakan tabel Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2017-2022 :

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2022

TAHUN	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
2017	Pendapatan Daerah	8.911.476.779.409,71	8.195.968.131.799,96
	Belanja Daerah	6.439.523.470.869,00	5.788.552.526.667,59
2018	Pendapatan Daerah	9.196.477.924.456,14	9.141.371.395.099,79
	Belanja Daerah	7.426.770.057.057,95	6.763.760.533.371,09
2019	Pendapatan Daerah	9.849.942.842.746,55	9.280.742.072.448,62
	Belanja Daerah	7.074.829.339.229,22	6.422.760.771.550,39
2020	Pendapatan Daerah	9.924.882.093.098,75	9.278.520.060.062,03
	Belanja Daerah	7.901.928.827.814,38	6.900.475.143.744,16
2021	Pendapatan Daerah	10.800.944.019.387,00	9.611.291.244.667,17
	Belanja Daerah	11.410.177.341.872,00	10.060.730.260.979,40
2022	Pendapatan Daerah	10.634.451.400.140,00	10.036.955.961.132,70
	Belanja Daerah	10.426.397.636.784,00	9.663.575.726.750,69

(Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Selatan)

Dari tabel realisasi anggaran tersebut menunjukkan jika LRA laporan realisasi anggaran Provinsi Sumatera Selatan adalah meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jika dilihat dari tahun 2017-2022 pendapatan Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan secara terus menerus setiap tahunnya meskipun secara tidak signifikan,

Pelaporan keuangan oleh pemerintah daerah memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas (pertanggungjawaban) atas sumber yang dipercaya. Sehingga pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan daerahnya apakah berhasil atau tidak. Akuntabilitas sektor publik juga dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Governance*.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Muhammad Ubaidillah (2019), hasil dari penelitian menyatakan dari segi rasio ekonomis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan di tahun 2014- 2022 berada pada kriteria ekonomis yakni sebesar 93,26%. Dari segi rasio efisien pada tahun 2014-2017, memiliki rata-rata rasio efisien mencapai 99,76% dapat disimpulkan sangat efisien. Serta dari segi rasio efektivitas pada tahun 2014-2017 kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Lamongan dapat dinyatakan tidak efektif, karena hanya mencapai 97,99%. Hal ini dikarenakan sesuai dengan kriteria efektivitas itu sendiri yang harus lebih dari 100% baru dikatakan efektif.

Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah tahapan evaluasi tentang taraf peningkatan atas pencapaian pelaksanaan suatu program Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian **“Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Konsep Value For Money ”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian diatas, maka berikut rumusan masalah pada penelitian ini yang muncul sebagai acuan untuk analisis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2022 ?
2. Bagaimana pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun Batasan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan Metode Value for money (Ekonomi, Efesien, dan Efektifitas)
2. Penelitian ini di BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode *value for money* di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017 – 2022 dan mengetahui pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

a. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan pokok pembahasan, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi dan kontribusi serta memberi perbendaharaan berupa tulisan bagi perkembangan ilmu pengetahuan

terutama penelitian yang berkaitan dengan pengukuran kinerja keuangan dengan berdasarkan konsep *value for money*.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan mengambil judul dan topik mengenai pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money*.

b. Ruang Lingkup Penelitian

Agar masalah ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka dalam penulisan penelitian ini membahas tentang analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan konsep *value for money* di Provinsi Sumatera Selatan periode 2017 - 2022.

c. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan ini yaitu untuk memberikan gambaran yang sistematis penulisan dan terarah serta mempermudah pemahaman tentang masalah-masalah yang disajikan dalam skripsi ini, maka penulisannya akan diuraikan dalam bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini berisi mengenai latar belakang yang akan menjelaskan alasan pemilihan judul. Bab ini juga memaparkan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, tujuan, manfaat, ruang lingkup penelitian, yang ingin dicapai dari penulisan laporan ini yang semuanya akan ditulis secara sistematis. Oleh karena itu dibuatlah sistematika penulisan agar penulisan laporan ini tetap dapat berjalan sesuai dengan alurnya dan tepat sasaran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam bab II ini menguraikan tentang landasan teori yang merupakan penjabaran dari kerangka yang berkaitan dengan pengukuran kinerja menggunakan konsep *value for money*, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi metodologi penelitian yang menguraikan tentang bagaimana penelitian dilakukan yang terdiri dari variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variable, populasi dan penentuan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab IV ini menjelaskan mengenai uraian hasil dan pembahasan yang terdiri dari analisis data, perhitungan statistik, serta pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini IV berisi tentang kesimpulan dan saran atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya serta saran sehubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

